



LAPORAN BULANAN
PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN
d/h SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
BULAN : MARET 2008

1. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Kegiatan

Pilot program PNPMM Agribisnis Perdesaan merupakan bagian integral dari PNPMM Mandiri Perdesaan, sehingga semua kemajuan PNPMM AP sekaligus merupakan kemajuan PNPMM MP di lokasi PNPMM AP.

PNPMM AP, pada bulan Maret 2008 kegiatan yang telah terlaksana di lokasi pilot program (empat provinsi) secara umum meliputi pelaksanaan pelatihan KPMD (KAD), pelaksanaan MD 1, Persiapan dan pelaksanaan Penggalian Gagasan (PEGAS). Bahkan pada lokasi program NTB, pelaksanaan tahapan telah mencapai MDKP, pelaksanaan MD II serta Pelatihan Tim Penulis Usulan.

Kegiatan pertemuan koordinasi antara ketiga subprogram SADI (PNPMM AP, IFC & ACIAR) telah terlaksana pada lokasi pilot program, dengan menghasilkan formulasi bentuk kerjasama di tataran implementasi. Meskipun demikian masih dirasakan perlu untuk memberi dorongan kepada wilayah lokasi program yang belum sepenuhnya melaksanakan pertemuan koordinasi antara ketiga subprogram.

1.2. Kegiatan Konsultan Manajemen Nasional di Provinsi (lokasi pilot program SADI) tahun 2008

Kegiatan konsultan manajemen nasional, Sp SADI dan Sp Monev di empat provinsi, dikelompokkan menjadi kegiatan-kegiatan koordinasi antar subprogram dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/provinsi.

No	Kegiatan	Tanggal	Agenda	Hasil
1	Koordinasi antar subprogram (SP1 PNPMM AP, SP2 IFC SADI, SP3 ACIAR SADI)			
	Koordinasi dgn IFC NTT	11 & 31 Maret	Hasil pertemuan dgn SKPD NTB, IFC & ACIAR melakukan sosialisasi	IFC bersedia utk sosialisasi
			Jadwal workshop	
	Koordinasi dgn mitra (lead firm) IFC NTB	4-6 Maret & 28 Maret	Lokakarya (a) Sosialisasi lead firm kacang tanah, (b) hasil scooping & peluang pasar mangga	Rumusan tentang aspek produksi, pemasaran & akses pendanaan
	Koordinasi dgn ACIAR NTB	25 Maret	Pertemuan lanjutan	
	Koordinasi dgn IFC Sulsel	11-13 Maret	Workshop dryer jagung	Potensi & masalah pengembangan jagung dan pasca panen
	Workshop Green KDP	19 Maret	Sosialisasi Green KDP Sulsel	Program-2 yg dapat disnergikan dgn SADI
2	Rapat Koordinasi Provinsi/Kabupaten			
	Rakor Kabupaten NTT	4-5 Maret	IST Pelatihan KAD	Pelatihan KAD
	Rakor Provinsi NTT	13-16 Maret	Koordinasi dgn TK Kab PNPMM MP	Mengundang SKPD Kab, FK-AP
			Persiapan mini workshop sosialisasi IFC di Kab Ngada & TTS	UPK & Penlok Jadwal workshop
	Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan NTB	1 Maret	Sosialisasi seluruh program (Gerbang Emas, PIDRA, GTZ Profi, PUAP, FEATI dll)	Program tidak tumpang tindih, & ada pertemuan lanjutan
	Rakor Provinsi NTB	22 Maret	Review kunjungan lapang	Pertemuan lanjutan
	Rakor Kab Lobar NTB	26 Maret	Review kunjungan lapang	Penguatan PEGAS, mengundang kelompok tani
	Koordinasi dgn TK Kab Sulsel	10 Maret	Koordinasi TK kab	Rencana pelatihan KAD & materi pelatihan
		17 Maret	Diskusi dgn PjO Kab & Faskab	Disetujui ancap-2 alokasi DOK PNPMM AP

2. KEMAJUAN PROGRAM

2.1. Progress Penyerapan BLM Tahun 2008

Capaian Penyerapan BLM PNPM Agribisnis Tahun 2008

No	Provinsi	Capaian Penyerapan BLM TA 2008		
		Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase (%)
1	NTB	3.330.600.000	0	0
2	NTT	3.330.600.000	0	0
3	Sulawesi Selatan	3.330.600.000	0	0
4	Sulawesi Tenggara	3.330.600.000	0	0
	Total	13.322.400.000	0	0

Oleh karena alur tahapan PNPM AP di lokasi pilot program masih dalam proses perencanaan, maka capaian penyerapan BLM PNPM AP untuk bulan ini belum ada.

2.2. Progress Penyerapan DOK Tahun 2008

Capaian Penyerapan DOK PNPM Agribisnis Tahun 2008

No	Provinsi	Capaian Penyerapan DOK TA 2008			
		Jumlah Kecamatan	Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase (%)
1	NTB	6	333.060.000	0	0
2	NTT	6	333.060.000	0	0
3	Sulawesi Selatan	6	333.060.000	0	0
4	Sulawesi Tenggara	6	333.060.000	0	0
	Total	24	1.332.240.000		

Oleh karena DIPA Revisi dan pengalokasian DOK PNPM AP masih belum jelas dan belum ada, maka capaian penyerapan DOK PNPM AP belum ada, meski dalam pelaksanaannya yang sudah berjalan telah dikeluarkan biaya untuk pelaksanaan alur tahapan PNPM AP.

2.3. Tahapan / Alur

Tahapan/alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTT

No	Tahapan	Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan			
		Jumlah Kec	Persentase (%)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	MAD I	6	100	75	100
2	MD I	6	100	74	99
3	Latih KPMD	6	100	74	99
4	PAGAS	6	100	61	81
5	MDKP	2	33	3	4

Tahapan/alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi NTB

No	Tahapan	Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan			
		Jumlah Kec	Persentase (%)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	MAD I	6	100	60	100
2	MD I	6	100	60	100
3	Latih KPMD	6	100	60	100
4	PAGAS	6	100	58	96
5	MDKP	6	100	32	53
6	MD II	3	50	24	40

Tahapan/alur Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tahapan	Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan			
		Jumlah Kec	Persentase (%)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	MAD I	6	100	64	100
2	MD I	6	100	64	100
3	Latih KPMD	6	100	64	100
4	PAGAS	1	17	5	8

Tahapan/alur Kegiatan PNPB Agribisnis Perdesaan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Tahapan	Kecamatan/Desa Yang Telah Melaksanakan			
		Jumlah Kec	Persentase (%)	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	MAD I	6	100	73	100
2	MD I	6	100	73	100
3	Latih KPMD	3	50	45	62

Progress tahapan/alur PNPB AP sampai bulan Maret 2008, tampak bahwa Provinsi NTB sudah memasuki tahapan MD 2, sedangkan provinsi lainnya masih berkisar pada tahapan/alur PAGAS, bahkan Provinsi Sultra, masih pada tahapan Pelatihan KPMD (KAD). Tetapi berdasarkan RKT Program SADI, diperkirakan bulan April 2008, seluruh provinsi wilayah pilot program telah mencapai tahapan MD 2.

Tahapan MD 2 di Provinsi NTB, telah mencapai 40% dimana 24 desa di Kabupaten Dompu sudah selesai, sedangkan 36 desa di Kabupaten Lombok Barat masih belum melaksanakan MD 2. Sedangkan tahapan PAGAS di Sulsel, bulan Maret 2008 ini baru satu kecamatan yang telah melaksanakan di Kabupaten Tana Toraja, dan diharapkan pada bulan April 2008, seluruh PAGAS pada wilayah pilot program diproyeksikan akan selesai. Untuk wilayah pilot program lainnya, tahapan/alur PAGAS diproyeksikan juga akan selesai pada minggu 2 bulan Mei 2008

2.4. Tingkat Partisipasi

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menghadiri Tahapan/Alur PNPB AP Provinsi NTB

No	Tahapan	Kabupaten Lombok Barat						Kabupaten Dompu					
		Lk	Pr	RTM	% Lk	% Pr	% RTM	Lk	Pr	RTM	% Lk	% Pr	% RTM
1	MAD I	111	80	78	58.12	41.88	40.84	121	41	91	74.69	25.31	56.17
2	MD I	892	346	689	72.05	27.95	55.65	952	297	856	76.22	23.78	68.53
3	Latih KPMD	24	24	0	50.00	50.00	0.00	35	37	0	48.61	51.39	0.00
4	PAGAS	5670	7844	9390	41.96	58.04	69.48	2172	3862	4507	36.00	64.00	74.69
5	MDKP	0	272	225	0.00	100.00	82.72	0	654	515	0.00	100.00	78.75
6	MD II							609	478	856	56.03	43.97	78.75

Sesuai dengan semangat MDG's, ternyata tingkat partisipasi perempuan sampai pada kegiatan MKP dan MD II di dua kabupaten lokasi cukup menggembirakan, dimana rata-rata tingkat partisipasi perempuan mencapai diatas 25%. Meskipun belum mencapai 50%, namun kondisi ini diharapkan akan terus membaik pada alur/tahapan kegiatan berikutnya.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menghadiri Tahapan/Alur PNPB AP Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	Tahapan	Kabupaten Bantaeng						Kabupaten Tana Toraja					
		Lk	Pr	RTM	% Lk	% Pr	% RTM	Lk	Pr	RTM	% Lk	% Pr	% RTM
1	MAD I	91	64	65	41	29	30	118	75	125	36	25	39
2	MD I	785	465	596	42	25	33	1.094	674	1.442	34	21	45
3	Pel. KAD	34	29	24	40	33	27	76	42	58	43	24	33
4	PAGAS							844	678	1.215	31	25	44

Pada Tabel di atas terlihat tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan program pada dua kabupaten memperlihatkan variasi tersendiri. Di kabupaten Bantaeng, kalangan laki-laki memiliki tingkat partisipasi terendah 40% dan tertinggi 42%, sementara di Tana Toraja terendah 36% dan tertinggi 43%. Untuk kalangan perempuan di Bantaeng tingkat partisipasi terendah 25% dan tertinggi 33%, sementara di Tana Toraja terendah 21% dan tertinggi 25%, sementara untuk tingkat partisipasi kalangan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Tana Toraja relatif lebih tinggi dari pada Bantaeng yaitu terendah 33% dan tertinggi 45%, sementara di Bantaeng terendah 27% dan tertinggi 33%.

3. PERMASALAHAN DAN SARAN

3.1. Permasalahan

1. Masalah keterlambatan pencairan DOK PNPM AP
Dana Operasional Kegiatan (DOK) yang diperuntukkan untuk biaya perencanaan program sampai akhir bulan Maret 2008 belum juga dapat dicairkan, sementara program PNPM-AP sudah berjalan sejak awal Pebruari 2008 dan sampai saat ini (bulan Maret 2008) telah terlaksana berbagai proses tahapan/alur yaitu ; MAD I, MD I dan Pelatihan KAD, PAGAS, MDKP bahkan MD 2. Belum cairnya DOK tersebut secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan perencanaan program. Belum cairnya DOK membuat pelaku PNPM-AP pada tingkat Kecamatan merasa kewalahan untuk mencari sumber pembiayaan dari pihak ketiga dan hal tersebut seringkali menimbulkan kesulitan Faskab dan FK-AP lokasi wilayah pilot program. Masalah tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan tahapan/alur PNPM AP.
2. Dokumen pendukung PTO dan modul pelatihan untuk PNPM-AP secara resmi belum di terbitkan, sehingga kader agribisnis desa masih menggunakan fotocopian modul MP.
3. Tim Penulis Usulan masih sangat awam dengan pengetahuan pertanian terutama yang mencakup tentang teknis pelatihan dan alat/mesin pertanian yang akan digunakan untuk praktik pelatihan.

3.2. Saran

1. Masalah DOK, perlu dilakukan dorongan secara terus-menerus kepada semua pihak yang bertanggung jawab pada pencairan DOK dan selanjutnya setiap perkembangannya perlu diinformasikan kepada spesialis agar tidak terjadi misinformasi/mispersepsi.
2. Bahwa sampai bulan Maret 2008 meskipun revisi DIPA belum ada serta DOK belum terbit progres kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai tahapan MDKP dan MD II. Namun kondisi ini akan lebih baik kalau didukung dengan kepastian dengan diterbitkannya hasil revisi DIPA dan DOK, sehingga diperlukan kerja keras dari NMC dan Sekreteriat demi segera terbitnya revisi DIPA dan DOK
3. Tindak lanjut untuk hal tersebut diatas perlunya ditetapkan PTO yang final serta dokumen pelatihan yang dapat dipergunakan oleh kader desa dalam memfasilitasi kegiatan musyawarah tingkat dusun dan musyawarah perempuan.
4. Memberikan penguatan kapasitas FK-AP terkait dengan pemahaman teknis pertanian dan alat/mesin pertanian untuk praktik pelatihan dalam kerangka diseminasi kepada Tim Penulis Usulan.